

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) DI KELURAHAN
BALAI RAJA KECAMATAN PINGGIR
KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar (S.Sos)
Pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH:

VALEN BIVO EDLI
12070514657

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Valen Bivo Edli
 Nim : 12070514657
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 di Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

DISETUJUI OLEH :
 DOSEN PEMBIMBING

Dr. Mashuri, S.Ag, M.A

NIP. 197707212014111002

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PROGRAM STUDI

Administrasi Negara



Dr. Desri Miftah, S.E., M.M., Ak.

NIP. 19740412 200604 2 002

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si.

NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Valen Bivo Edli
 NIM : 12070514657
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis
 Tanggal Ujian : 08 Januari 2026

Tim Penguji

Ketua
 Dr. Sitti Rahmah, M.Si

Sekretaris
 Ermansyah, S.E., M.M

Penguji I
 Ratna Dewi, S.Sos., M.Si

Penguji II
 Dr. Mashuri, S.Ag., M.A

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VALEN BVO EDLI
 NIM : 12070514657
 Tempat/Tgl. Lahir : Puri, 10 Mei 2001
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN KEMU SOSIAL
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA

Judul Skripsi:

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
 “DI KAWILAH KANTON BALAI RAZA KEKAMPARAN PINBEGIR KABUPATEN BENGKALIS”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa .

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

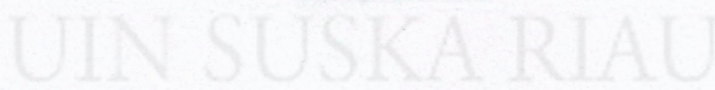
Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Januari 2026

Suat pernyataan



Valen Bvo Edli
 NIM. 12070514657



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI KELURAHAN BALAI RAJA KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS

Oleh

VALEN BIVO EDLI
12070514657

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Program PKK merupakan salah satu program pemerintah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum perempuan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive, terdiri dari pengurus PKK, aparat kelurahan, serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program PKK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program PKK di Kelurahan Balai Raja telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Beberapa program masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat program. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya pencapaian tujuan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan koordinasi, pembinaan, serta penguatan peran masyarakat agar pelaksanaan Program PKK dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Implementasi, Program PKK, Pemberdayaan, Kesejahteraan Keluarga, Balai Raja*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE FAMILY WELFARE EMPOWERMENT PROGRAM (PKK) IN BALAI RAJA VILLAGE, PINGGIR DISTRICT, BENGKALIS REGENCY

By

VALEN BIVO EDLI
12070514657

This study aims to describe and analyze the implementation of the Family Welfare Empowerment Program (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga / PKK) in Balai Raja Village, Pinggir District, Bengkalis Regency. The PKK program is one of the government initiatives focused on improving family welfare through community empowerment, particularly empowering women, by encouraging active community participation in various social, economic, and health-related activities. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants were selected using a purposive sampling technique, consisting of PKK administrators, village officials, and community members involved in the implementation of the PKK program. The results of the study indicate that the implementation of the PKK program in Balai Raja Village has been carried out but has not yet been fully optimal. Several programs still face obstacles, such as limited human resources, low community participation, and a lack of public understanding regarding the objectives and benefits of the program. These conditions have resulted in the program not achieving its empowerment goals and family welfare improvement to the fullest extent. Therefore, efforts to enhance coordination, guidance, and the strengthening of community roles are necessary to ensure the PKK program can be implemented more effectively and sustainably.

Keywords: *Implementation, PKK Program, Empowerment, Family Welfare, Balai Raja*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis mengucapkan puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan dan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis. Kemudian sholawat dan salam kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan lafazh Allahumma shalli „alaa sayyidina Muhammad wa„alaa aali sayyidina Muhammad, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis”**. Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata (S1) pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih bahwa masih banyak kekurangan serta kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman pada saat penyusunan. Namun dengan adanya pihak-pihak yang mendorong dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis baik langsung ataupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Ayahanda Yusmardi, dan Ibunda Yuliawati orang tua tercinta. Skripsi ini saya persembahkan dengan sepenuh hati untuk dua orang yang paling berarti dalam hidup saya: Ayah dan Ibu. Terima kasih untuk setiap doa yang tak pernah putus, pelukan yang menguatkan, dan semangat yang selalu kalian berikan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan di saat saya mulai ragu pada diri sendiri. Kalian adalah alasan utama saya bisa bertahan dan terus melangkah. Proses menyusun skripsi ini tentu tidak mudah. Ada banyak tantangan, begadang, dan momen ingin menyerah. Tapi semua itu bisa saya lewati berkat dukungan dari orang tua tercinta, dan kepada Axcel Bivo Edli (adik kandung), dan M. Rayhan Bivo Edli (adik kandung) yang membuat saya semangat membuat skripsi karena saya ingin memberikan contoh yang baik kepada dua adik saya sendiri.

2. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibuk Dr. Desrir Miftah, SE., M.M., Ak selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan I,II,dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Administrasi Negara
5. Bapak Dr. Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara
6. Bapak Dr. Mashuri, MA selaku pembimbing, yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penelitian yang penulis lakukan.
7. Ibuk Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si selaku pembimbing akademik, yang selalu memberikan masukan dan nasehat selama masa perkuliahan.
8. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Kepada ibuk, bapak, kakak abang yang berada pada kantor kelurahan balai raja yang senantiasa melancarkan jalan penulis dalam penelitan pembuatan skripsi ini.

10. Terimakasih Bapak/Ibu informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait pertanyaan yang penulis ajukan.

11. Terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman penulis yang tidak bisa di sebutkan namanya satu persatu telah memberikan support kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.

12. Valen Bivo Edli, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wasalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 12 Januari 2026

VALEN BIVO EDLI
NIM 12070514657

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Uraian Teori.....	13
2.1.1 Pengertian Implementasi	13
2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	14
2.1.3 Pengertian Program	16
2.1.4 Tujuan Kebijakan	17
2.1.5 Proses Kebijakan Publik	20
2.1.6 Pemberdayaan Masyarakat.....	21
2.1.7 Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Kajian Terdahulu	25
2.3 Pandangan Islam terhadap pemberdayaan kesejahteraan Keluarga	27
2.4 Kerangka Berpikir	28
2.5 Konsep Operasional.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	31
3.3 Sumber Data Penelitian	31
3.4 Informan Penelitian	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
4.1 Kondisi Geografis Kelurahan Balai Raja	35
4.2 Kondisi Demografi Kelurahan Balai Raja.....	37
4.3 Visi dan Misi	39
4.4 Struktur Organisasi PKK.....	41
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
5.1 Hasil Penelitian.....	58
5.1.1 Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.....	58
5.2 Pembahasan	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

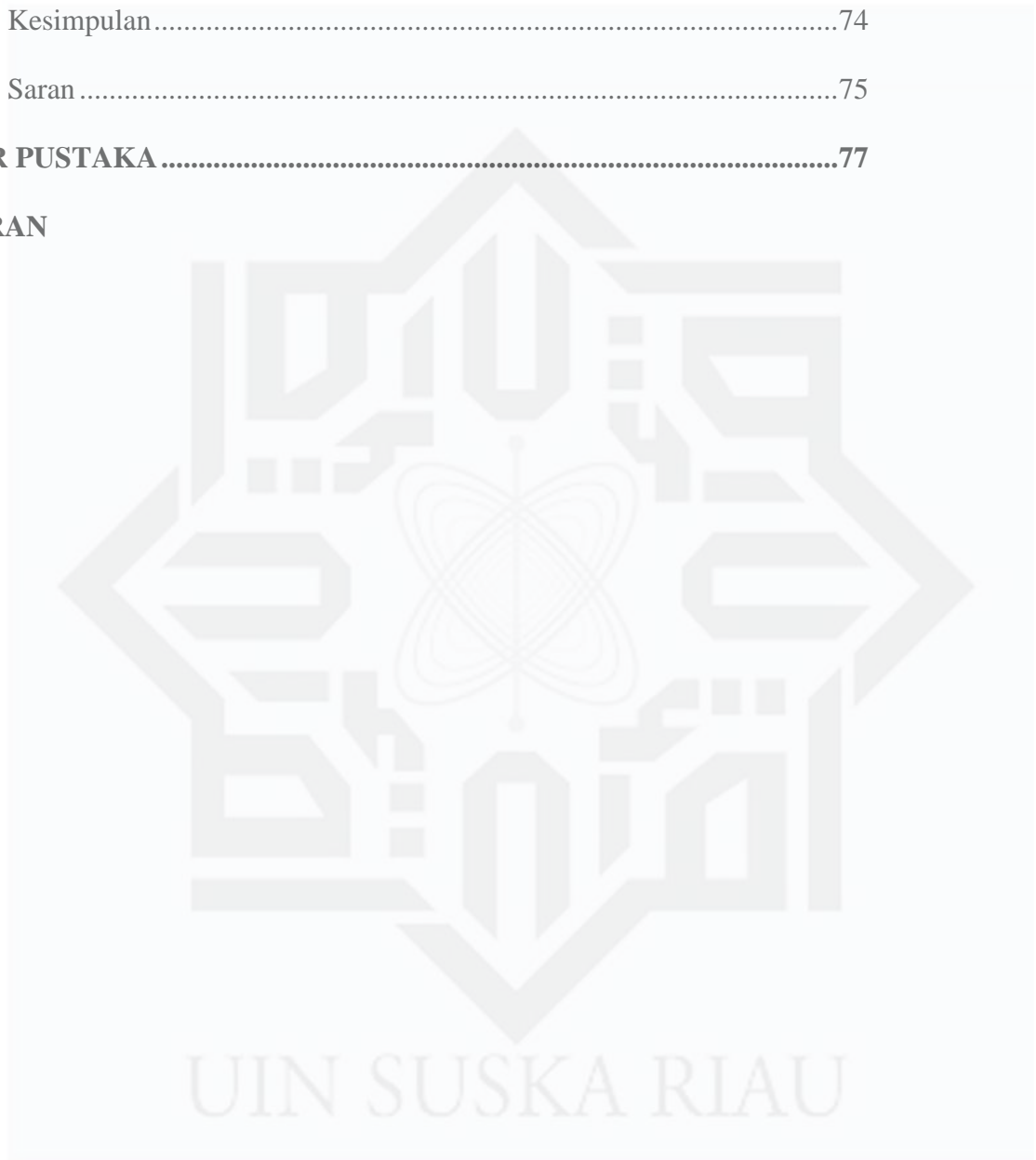
5.2.1 Faktor Penghambat Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	67
---	----

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....74

6.1 Kesimpulan.....	74
6.2 Saran	75

DAFTAR PUSTAKA77

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Implementasi program kegiatan PKK kelurahan Balai Raja	5
Tabel 1.2	Jumlah kasus gizi buruk/stunting anak balita di kelurahan balai raja tahun 2022-2024	6
Tabel 1.3	Konsisi kemendirian ekonomi keluarga kelurahan balai raja tahun 2022-2024	7
Tabel 1.4	Kondisi Lingkungan Rumah Dan Pengelolaan Sampau Kelurahan Balai Raja Tahun 2022-2024	8
Tabel 2.1	Kajian Terdahulu	25
Tabel 2.2	Kerangka Berpikir.....	29
Tabel 2.3	Konsep Operasional.....	29
Tabel 3.1	Data Penelitian.....	33
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kelurahan Balai Raja Tahun 2024.....	37
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Kelurahan Balai Raja Tahun 2024	38
Tabel 4.3	Mata Pencaharian Penduduk Balai Raja Tahun 2024.....	38
Tabel 4.4	Tingkat Pendidikan Di Kelurahan Balai Raja Tahun 2024	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi PKK.....	41
Gambar 5.1	Partisipasi dalam Stand Bazar MTQ ke-20 Kecamatan Pinggir	64
Gambar 5.2	Prestasi dalam Lomba Pelaksanaan Pokja III Tingkat Kabupaten.....	64
Gambar 5.3	Sosialisasi Pola Asuh Anak, KDRT, dan Narkoba.....	66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan dapat disamakan dengan pengembangan atau pembangunan, yaitu upaya membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong kesadaran akan potensi yang dimiliki agar berkembang menjadi tindakan nyata. Pada dasarnya, pemberdayaan merupakan proses menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri dalam pembangunan. Setiap anggota masyarakat memiliki potensi dan kemampuan untuk membawa komunitasnya ke arah yang lebih baik, namun sering terhambat oleh faktor tertentu. Oleh karena itu, diperlukan dorongan dan proses penyadaran melalui pengembangan kapasitas, yaitu peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif secara mandiri dan berkelanjutan dalam pembangunan (Rahmawati 2019).

Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional yang tumbuh dari dan untuk masyarakat sebagai penggerak utama dalam mewujudkan keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. PKK berfokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga melalui 10 Program Pokok PKK, yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pangan, sandang, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat, serta perumahan dan tata laksana rumah tangga. Organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga seperti PKK memiliki urgensi yang sangat penting dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan masyarakat karena berperan langsung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan (Hanis and Marzaman 2020).

1. Pemberdayaan Perempuan, PKK berperan penting dalam meningkatkan kapasitas perempuan melalui pelatihan dan pengetahuan di bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan agar berperan aktif dalam keluarga dan masyarakat.
2. Kesejahteraan Keluarga, Melalui berbagai program, PKK mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan keamanan.
3. Pendidikan dan Keterampilan, PKK menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, guna mengurangi kemiskinan.
4. Kesehatan dan Kesejahteraan, PKK berkontribusi dalam peningkatan kesehatan keluarga melalui penyuluhan gizi, sanitasi, kesehatan reproduksi, dan pencegahan penyakit.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat berjalan efektif (Salu 2022). Salah satu program yang berperan dalam peningkatan kualitas hidup keluarga adalah PKK, yang dipandang sebagai pendekatan pemberdayaan berbasis peningkatan kapasitas keluarga di berbagai bidang. PKK menerapkan pendekatan *bottom-up* dengan menempatkan keluarga sebagai unit terkecil yang berperan aktif dalam pembangunan sosial. Pendekatan ini menekankan partisipasi anggota keluarga dalam perencanaan, pelaksanaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemantauan program guna meningkatkan kesejahteraan keluarga (Silvana et al, 2023).

PKK ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Peraturan ini menegaskan bahwa hakikat pembangunan nasional tercapai apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat terwujud dengan baik. Keluarga yang tenteram mencerminkan keberhasilan negara dalam menciptakan kondisi yang aman, harmonis, dan sejahtera, karena ketenteraman keluarga menjadi indikator penting keberhasilan pelaksanaan program kesejahteraan oleh pemerintah (WIDIANINGRUM 2023).

Saat ini masyarakat menghadapi berbagai perubahan dan tantangan dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dan perlu terus dimaksimalkan karena merupakan proses jangka panjang dan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia dihadapkan pada dinamika baru yang berpengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah hadir melalui berbagai program pemberdayaan untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan. Upaya pemberdayaan sebenarnya telah dilakukan sejak lama, namun terus diperkuat guna membentuk masyarakat yang tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan dan perubahan yang terjadi (Mardiah 2022).

Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus penting dalam pembangunan nasional di Indonesia untuk memperbaiki kondisi dan kualitas hidup masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya ini hanya dapat berjalan efektif apabila disertai partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sosial. Sejalan dengan itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu sasaran utama pembangunan, sehingga diperlukan pembangunan di berbagai bidang yang saling berkesinambungan (Devfa and Mardhiah 2022).

Kelurahan Balai Raja merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Pinggir, dengan mata pencaharian masyarakat yang umumnya sebagai petani dan buruh. Salah satu organisasi yang berkembang di wilayah ini adalah Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang berperan sebagai mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Program PKK dikelola secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, desa, hingga pusat. PKK berfungsi dalam pendataan berbagai aspek masyarakat, seperti data warga, ibu hamil, bayi dan balita, kelahiran, kematian, serta aktivitas sosial. Selain itu, PKK juga berperan dalam memberikan pemahaman yang tepat terkait isu keagamaan, khususnya mengenai program KB, serta membantu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat disajikan tabel mengenai 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang telah diimplementasikan di Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Implementasi program kegiatan PKK kelurahan Balai Raja

No	Program	Bentuk Kegiatan	Realisasi		
			2022	2023	2024
1	Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	Arisan rutin, yasinan, dan pengajian	Terealisasi	Terealisasi	Terealisasi
2	Gotong royong	Membersihkan jalan, got, dan mesjid	Terealisasi	Terealisasi	Terealisasi
3	Pendidikan dan Keterampilan	Sosialisasi anak usia dini hingga usia 5-12 tahun	Terealisasi	Terealisasi	Terealisasi
4	Kesehatan	Posyandu anak dan lansia	Terealisasi	Terealisasi	Terealisasi
5	Pangan	Penyuluhan Gizi, Pembagian makanan tambahan	Kurang Terealisasi	Kurang Terealisasi	Kurang Terealisasi
6	Sandang	Pelatihan jahit menjahit, Kegiatan produksi pakaian, Mempromosikan produk lokal	Terealisasi	Terealisasi	Terealisasi
7	Mengembangkan Kehidupan Berkoperasi	Penyuluhan tentang koperasi, Pelatihan manajemen koperasi, Pengembangan usaha koperasi	Kurang Terealisasi	Kurang Terealisasi	Kurang Terealisasi
8	Kelestarian Lingkungan Hidup	Penanaman pohon dan penghijauan, Pengelolaan sampah, Kampanye penyadaran lingkungan	Terealisasi	Terealisasi	Terealisasi
9	Perencanaan Sehat	Penyuluhan tentang perencanaan keluarga, Pelayanan kesehatan reproduksi, Penyuluhan	Terealisasi	Terealisasi	Terealisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Program	Bentuk Kegiatan	Realisasi		
			2022	2023	2024
		tentang kesehatan seksual			
10	Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga	Penyuluhan tentang perumahan sehat, Perbaikan dan pemeliharaan rumah	Kurang Terealisasi	Kurang Terealisasi	Kurang Terealisasi

Sumber: Data kelurahan tahun 2025

Untuk melihat dampak kurang optimalnya pelaksanaan program Pangan PKK, khususnya terhadap kondisi gizi anak balita, peneliti menyajikan data jumlah kasus gizi buruk atau stunting di Kelurahan Balai Raja selama periode tahun 2022-2024.

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Gizi Buruk/Stunting Anak Balita di Kelurahan Balai Raja Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Balita	Jumlah Kasus Gizi Buruk/Stunting	Persentase
1	2022	185	18	9,7%
2	2023	192	24	12,5%
3	2024	198	31	15,6%

Sumber: Data Posyandu dan Kelurahan Balai Raja, 2025

Berdasarkan Tabel 1.2, jumlah kasus gizi buruk atau stunting pada anak balita di Kelurahan Balai Raja menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 18 kasus atau 9,7% dari total balita, kemudian meningkat menjadi 24 kasus (12,5%) pada tahun 2023, dan kembali mengalami kenaikan menjadi 31 kasus atau 15,6% pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan masih rendahnya pemahaman ibu rumah tangga mengenai pola makan sehat serta belum optimalnya pelaksanaan program Pangan PKK dalam upaya pencegahan gizi buruk dan stunting.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan program Mengembangkan Kehidupan Berkoperasi terhadap kemandirian ekonomi keluarga dianalisis melalui penyajian data kondisi ekonomi keluarga di Kelurahan Balai Raja selama periode tahun 2022–2024. Data tersebut digunakan untuk melihat tingkat kemandirian ekonomi masyarakat serta kontribusi program perkoperasian dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Tabel 1.3 Kondisi Kemandirian Ekonomi Keluarga Kelurahan Balai Raja Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	KK Kurang Mandiri Secara Ekonomi	KK Mengikuti Kegiatan Koperasi	Persentase KK Kurang Mandiri
1	2022	420	118	42	28,1%
2	2023	432	136	39	31,5%
3	2024	445	159	35	35,7%

Sumber: Data Posyandu dan Kelurahan Balai Raja, 2025

Berdasarkan Tabel 1.3, jumlah kepala keluarga yang belum mandiri secara ekonomi di Kelurahan Balai Raja mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 118 KK atau 28,1% dari total 420 KK, kemudian meningkat menjadi 136 KK (31,5%) pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 159 KK atau 35,7% pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan koperasi justru mengalami penurunan, yang menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perkoperasian.

Pelaksanaan program Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, khususnya terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat, peneliti menyajikan data kondisi lingkungan rumah dan pengelolaan sampah di Kelurahan Balai Raja selama tahun 2022-2024.

Tabel 1.4 Kondisi Lingkungan Rumah dan Pengelolaan Sampah Kelurahan Balai Raja Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	KK dengan Lingkungan Rumah Kurang Sehat	KK Tidak Mengelola Sampah dengan Baik	Kasus Banjir Lingkungan
1	2022	420	96	110	3
2	2023	432	118	132	5
3	2024	445	141	158	7

Sumber: Data Posyandu dan Kelurahan Balai Raja, 2025

Berdasarkan Tabel 1.4, kondisi lingkungan rumah di Kelurahan Balai Raja menunjukkan kecenderungan memburuk dari tahun 2022 hingga 2024. Jumlah kepala keluarga dengan lingkungan rumah yang kurang sehat meningkat dari 96 KK pada tahun 2022 menjadi 118 KK pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 141 KK pada tahun 2024. Hal serupa juga terlihat pada pengelolaan sampah rumah tangga, di mana jumlah KK yang tidak mengelola sampah dengan baik meningkat dari 110 KK pada tahun 2022 menjadi 132 KK pada tahun 2023, dan mencapai 158 KK pada tahun 2024. Peningkatan tersebut sejalan dengan bertambahnya kasus banjir lingkungan, yang menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan rumah tangga dan sampah berdampak langsung pada kesehatan keluarga serta kondisi lingkungan sekitar.

Dari data diatas terdapat beberapa program yang kurang terealisasi, diantaranya adalah program Pangan, Mengembangkan kehidupan berkoperasi, dan Perumahan dan tata laksana rumah tangga, hal ini dapat menghambat fungsinya dalam memberikan penyuluhan terhadap Masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya berbagai dampak negatif yang terjadi diantaranya:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Gizi buruk atau stunting meningkat terutama pada anak-anak balita karena minimnya pemahaman ibu rumah tangga tentang pola makan sehat.
2. Ekonomi keluarga tidak mandiri tanpa akses dan pemahaman berkoperasi, banyak keluarga sulit bangkit dari kemiskinan dan bertambahnya angka kemiskinan.
3. Lingkungan rumah tidak sehat atau tidak tertata kurangnya pengetahuan mengelola rumah tangga dan sampah rumah tangga dapat berdampak pada kesehatan keluarga dan lingkungan yang banjir.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka judul penelitian ini adalah “**Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis?
2. Apa saja faktor penghambat program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk menganalisa implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di kelurahan balai raja kecamatan pinggir kabupaten bengkalis.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di kelurahan balai raja kecamatan pinggir kabupaten bengkalis.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan dengan konsep implementasi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga serta dapat memperkaya khasana ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi pemerintahan pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bisa berguna kepada pengambil kebijakan dalam menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Balai Raja dalam upaya melaksanakan fungsi yang optimal kepada masyarakat dan diharapkan dapat memperbaiki, meningkatkan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagai salah satu wujud kinerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Penelitian ini ditulis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional, dan kerangka pikir penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi dan menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, baik sejarahnya maupun visi dan misi, serta struktur organisasi nya.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan laporan hasil penelitian dan pembahasan bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Di Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten
Bengkalis

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian, berisikan kesimpulan serta saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Wahab (1997:45) Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan. Wahab juga mengatakan, dalam implementasi khususnya yang dilibatkan oleh banyak organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yakni: (1) pemprakarsa kebijakan/pembuat kebijakan pusat, (2) pejabat-pejabat pelaksana dilapangan, (3) aktor-aktor perorangan diluar badan-badan pemerintah kepada siapa programprogram itu diwujudkan yakni kelompok-kelompok sasaran (Riana 2014).

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara tersebut (sistem penyampaian/penerusan kebijakan negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sarana-sarana yang dikehendaki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan di atas nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2005:90) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yakni faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi (Sukarman and Sugiar 2017).

1. Komunikasi

Secara umum Edward III membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni:

a. Transmisi

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah di keluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan diabaikan atau sering kali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan yang dikeluarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Konsistensi

Jika implementasi berlangsung efektif, perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah tersebut mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan melaksanakan tugasnya dengan baik.

c. Kejelasan

Edward mengidentifikasi enam faktor terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor yang paling penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas saja menjadi dokumen.

3. Disposisi (kecenderungan atau tingkah laku)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, dia akan dapat menjalankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standart operating procedure atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.1.3 Pengertian Program

Program pemerintah merupakan suatu bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga merupakan suatu kebijakan. Thomas R. Dye dalam Tangkilisan (2003:1) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya (Susatin 2019).

Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan “sesuatu yang tidak di lakukan”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan “sesuatu yang di lakukan” oleh pemerintah.

Menurut David Easton (1953:129) dalam penelitian Harmoko Rudi Kebijakan Publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa bahwa secara luas kebijakan publik dapat di definisikan sebagai suatu hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Definisi Easton ini, mensyaratkan sifat otoritatif dalam proses alokasi. Tetapi di dalam kenyataannya hanya pemerintah sajalah yang dapat bertindak secara otoritatif kepada seluruh masyarakat, apapun yang di pilih pemerintah baik bertindak maupun tidak bertindak terungkapkan dalam alokasi nilai.

Sehingga suatu kebijakan publik memang dibuat untuk memenuhi kepentingan publik dan dijauhkan dari kepentingan para aktor pembuat kebijakan. Dapat di simpulkan, kebijakan publik adalah suatu bentuk kegiatan yang dipilih oleh pemerintah dalam suatu bidang kegiatan untuk melakukan atau tidak melakukan dalam memecahkan masalah publik sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat guna memenuhi tujuan dan kepentingan serta penyelenggaraan urusan-urusan publik.

2.1.4 Tujuan Kebijakan

Fungsi utama negara adalah mewujudkan, menjalankan, dan melaksanakan kebijakan publik bagi seluruh masyarakat. Kebijakan publik menjadi instrumen penting bagi negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Dalam pelaksanaannya, kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah memiliki beberapa tujuan utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tujuan-tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Memelihara Ketertiban Umum (Negara sebagai Stabilisator)

Salah satu tujuan utama kebijakan pemerintah adalah memelihara ketertiban umum, di mana negara berperan sebagai stabilisator. Ketertiban umum merupakan kondisi yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat, karena tanpa adanya ketertiban, aktivitas sosial, ekonomi, dan politik tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam menjalankan fungsi ini, negara bertanggung jawab menciptakan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Peran negara sebagai stabilisator diwujudkan melalui keberadaan aparat keamanan dan penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan serta mencegah terjadinya konflik sosial. Selain itu, negara juga berperan dalam mengendalikan gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Dengan terciptanya ketertiban umum, masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya secara normal dan pembangunan nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan.

2. Memajukan Perkembangan Masyarakat dalam Berbagai Aspek

Tujuan kebijakan pemerintah selanjutnya adalah memajukan perkembangan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Negara memiliki kewajiban untuk mendorong kemajuan masyarakat, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, maupun teknologi. Kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperluas kesempatan bagi setiap warga negara.

Dalam konteks ini, negara berperan sebagai penggerak pembangunan yang menciptakan berbagai program dan kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan merupakan contoh nyata dari upaya pemerintah dalam memajukan perkembangan masyarakat. Kemajuan tersebut tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan.

3. Memadukan Berbagai Aktivitas dalam Kehidupan Masyarakat

Masyarakat terdiri dari berbagai kelompok dengan latar belakang kepentingan yang beragam. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah juga bertujuan untuk memadukan berbagai aktivitas masyarakat agar berjalan secara harmonis dan saling mendukung. Negara berperan sebagai koordinator yang menelaraskan kepentingan antar kelompok masyarakat, sektor, dan lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik kepentingan.

Melalui kebijakan publik, pemerintah mengintegrasikan peran berbagai pihak, seperti pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta masyarakat sipil dalam pelaksanaan pembangunan. Koordinasi yang baik antar pihak tersebut sangat diperlukan agar setiap aktivitas pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan adanya pemaduan aktivitas, tujuan pembangunan nasional dapat dicapai secara lebih optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menunjukkan dan Membagi Benda Material dan Nonmaterial

Tujuan kebijakan pemerintah lainnya adalah menunjukkan dan membagi benda material dan nonmaterial secara adil kepada masyarakat.

Benda material mencakup sumber daya ekonomi, fasilitas umum, dan pelayanan publik, sedangkan benda nonmaterial meliputi rasa aman, keadilan, perlindungan hukum, dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh hak-haknya secara adil dan merata.

Kebijakan distribusi dan redistribusi menjadi instrumen penting bagi negara dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Melalui kebijakan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Pembagian benda nonmaterial, seperti keadilan dan kepastian hukum, juga menjadi bagian penting dari fungsi negara dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

2.1.5 Proses Kebijakan Publik

Keputusan kebijakan merupakan puncak dari rangkaian proses kebijakan publik yang telah melalui berbagai tahapan sebelumnya. Pada tahap ini, berbagai pertimbangan, analisis, dan masukan dari aktor kebijakan dirumuskan menjadi suatu keputusan yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, keputusan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses perumusan kebijakan yang berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahap keputusan kebijakan bukan sekadar proses memilih satu alternatif dari berbagai pilihan yang tersedia, melainkan merupakan tindakan menentukan kebijakan yang dianggap paling tepat untuk dilaksanakan. Keputusan tersebut menjadi dasar bagi tindakan pemerintah dalam menangani permasalahan publik yang dihadapi, sehingga memiliki implikasi yang luas terhadap masyarakat. Dengan demikian, kualitas keputusan kebijakan sangat bergantung pada ketepatan analisis masalah dan alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Menurut Winarno (2007:29), masing-masing alternatif kebijakan saling bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang mampu memecahkan masalah publik. Alternatif-alternatif tersebut disusun berdasarkan berbagai kepentingan, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan. Proses persaingan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak lahir secara netral, melainkan dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan ekonomi.

Setelah keputusan kebijakan ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan menjadi tolok ukur keberhasilan keputusan yang telah diambil, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam menyelesaikan masalah publik. Hasil evaluasi ini kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan berikutnya (Pathony, 2020). (Pathony 2020).

2.1.6 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan konsep yang menjelaskan sekaligus proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan menggambarkan serangkaian upaya yang dilakukan secara terencana dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok masyarakat. Sementara itu, sebagai tujuan, pemberdayaan mengarah pada kondisi ideal yang ingin dicapai, yaitu terciptanya masyarakat yang memiliki kemampuan, kemandirian, serta kekuatan untuk menentukan masa depannya sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga menekankan pentingnya tahapan dan mekanisme dalam mencapai perubahan sosial yang diharapkan (Salam, Kamariyah, and Pramudiana 2024).

Menurut Sumodiningrat (2009:60), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Pendekatan partisipatif ini diharapkan mampu menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantarkan masyarakat miskin menuju kondisi yang lebih mandiri, sejahtera, dan berkeadilan, serta berlandaskan iman dan takwa (Salam, Kamariyah, dan Pramudiana, 2024). Pandangan ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari peran aktif masyarakat itu sendiri, karena masyarakat diposisikan sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan.

Tujuan pemberdayaan masyarakat menunjuk pada kondisi atau keadaan yang ingin dicapai melalui perubahan sosial. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan fisik, ekonomi, maupun sosial. Dalam konteks ini, pemberdayaan bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya, informasi, serta kesempatan yang memungkinkan mereka meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Pemberdayaan juga berkaitan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

erat dengan upaya membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga mencakup penguatan aspek nonmaterial, seperti kepercayaan diri, kemampuan menyampaikan aspirasi, dan keberanian untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat yang berdaya tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan ekonominya, tetapi juga aktif terlibat dalam kegiatan sosial, memiliki mata pencaharian yang layak, serta mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan secara mandiri. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people-centered development*), karena bertujuan menciptakan masyarakat yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan.

2.1.7 Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat bermula dari Seminar “*Home Economic*” di Bogor pada tahun 1957. Sebagai tindak lanjut dari seminar tersebut, pada tahun 1961 Panitia Penyusunan Tata Susunan Pelajaran pada Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kementerian Pendidikan bersama kementerian-kementerian lainnya menyusun 10 segi Kehidupan Keluarga.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 Segi Pokok Keluarga dengan membentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para Isteri Kepala Dinas dan Isteri Kepala Daerah sampai dengan tingkat Desa dan Kelurahan yang kegiatannya didukung dengan Anggaran Pendapatan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belanja Daerah. Pada tanggal 27 Desember 1972 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Kawat Nomor Sus 3/6/12 kepada Gubernur KDH TKI Jawa Tengah dengan tembusan Gubernur KDH seluruh Indonesia, agar mengubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Sejak itu Gerakan PKK dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan nama Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan tanggal 27 Desember ditetapkan sebagai “Hari Kesatuan Gerakan PKK” yang diperingati setiap tahun (Hanis and Marzaman 2020).

Hubungan kerja dalam Gerakan PKK bersifat konsultatif, koordinatif dengan tetap memperhatikan hierarki dalam setiap jenjang Tim Penggerak PKK. Prinsip Gerakan PKK adalah pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Sifat gerakan ini universal dan independen, maka penyelenggaraannya perlu dilandasi dengan peraturan perundang-undang.

Tujuan Gerakan PKK adalah memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur. Sehat sejahtera lahir dan batin. Meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan, pengalaman pancasila, kegotong royongan serta kesetaraan dan keadilan gender. Untuk mencapai tujuan ini PKK dalam pelaksanaannya di lapangan perlu adanya dukungan dan peningkatan koordinasi dengan Pembina Tim Penggerak PKK di semua jenjang dan dengan lembaga lain (Mulyati and Suhaety 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga, baik di pedesaan maupun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya, dalam bidang mental spritual meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945. Dan fisik material meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan. Kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan.

2.2 Kajian Terdahulu

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Risa (2021)	Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Program Kesehatan Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa naga timbul belum sepenuhnya berjalan dengan baik, penelitian menunjukkan komunikasi baik, sumber daya cukup, disposisi cukup, dan struktur birokrasi tidak baik. Dan juga masih banyak perempuan-perempuan yang kemampuan dan pendidikan nya belum meningkat.
	Ayu (2022)	Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) dalam Meningkatkan Pendidikan dan Keterampilan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa naga timbul belum sepenuhnya berjalan dengan baik, penelitian menunjukkan komunikasi baik, sumber daya cukup, disposisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Perempuan di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa	cukup, dan struktur birokrasi tidak baik.
Tri Tiara (2023)	Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sangkir Indah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam bidang kesehatan sudah terimplementasi yaitu berupa posyandu, sosialisasi peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, sosialisasi kesehatan ibu dan anak, serta penyuluhan mengenai stunting. Dalam program kesehatan dapat dilihat bahwa proses komunikasi yaitu para tim penggerak PKK dalam penyampaian komunikasi dapat dipahami, sumber daya yaitu masih belum mencukupi, sikap/disposisi yaitu pengangkatan tim penggerak PKK tidak memiliki kriteria serta tidak ada insentif, struktur birokrasi yaitu kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP.	
Neneng (2022)	Implementasi Program Kerja PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Di Desa Ujungbatu Timur Kabupaten Rokan Hulu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program PKK dalam pemberdayaan ekonomi rumah tangga di Desa Ujungbatu Timur, Kabupaten Rokan Hulu telah menghasilkan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi yang implementasinya berupa kewirausahaan, pemberian kredit modal usaha, dan pengembangan usaha rumah tangga produktif.	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Pandangan Islam terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Menurut Al Quran surah Al Mai'dah Ayat 2 dijelaskan bahwa: Al-Ma'idah (2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah,(1) dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,(2) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)(3) dan qalāid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),(4) dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya.(5) Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.

Ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2 menegaskan prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu kewajiban tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta larangan saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Pada bagian akhir ayat tersebut, Allah SWT secara tegas memerintahkan orang-orang beriman untuk membangun kerja sama yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan (*al-birr*) dan ketakwaan (*at-taqwa*), yang bertujuan menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera. Perintah ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan umat manusia.

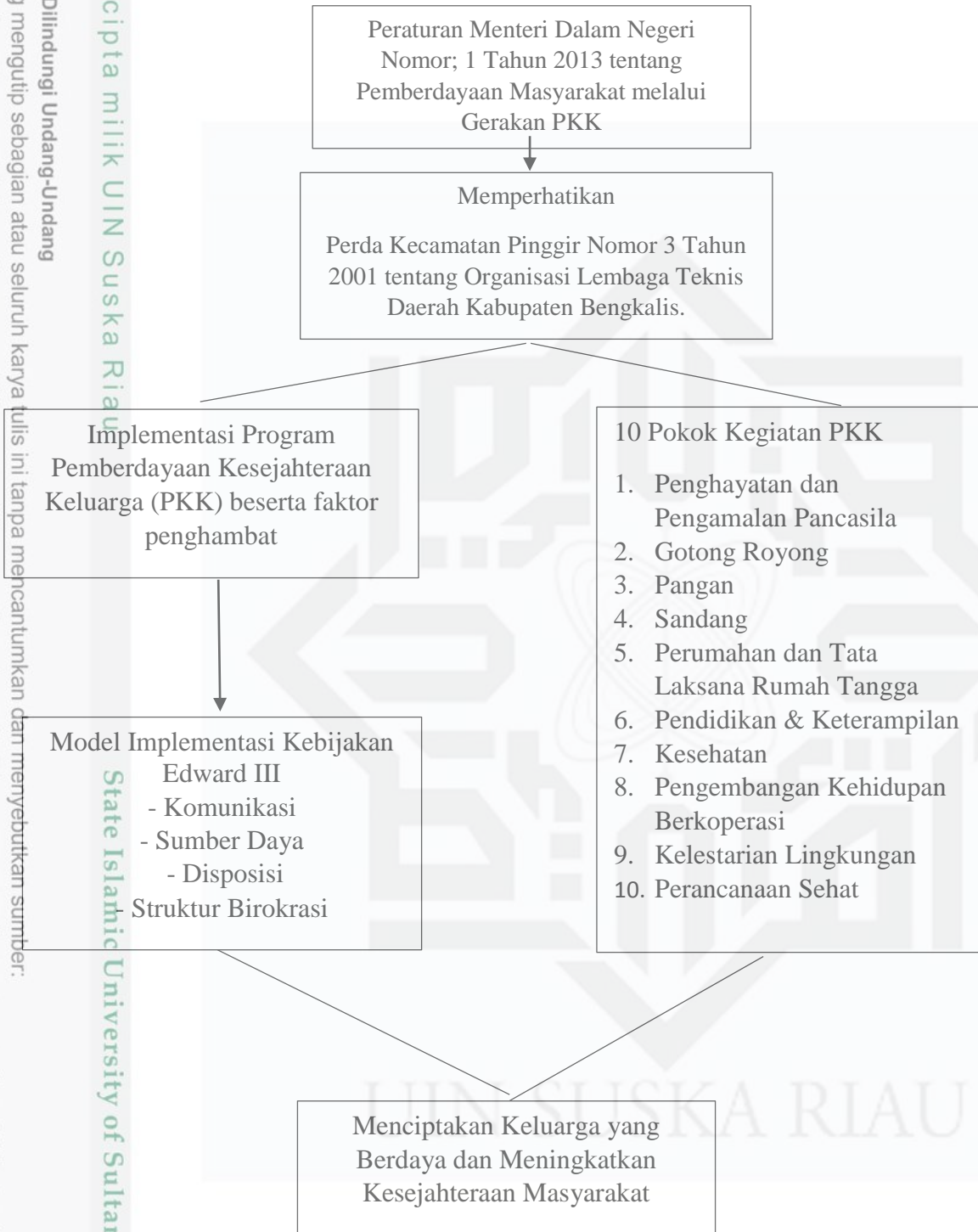
Makna tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan mencakup segala bentuk kerja sama yang membawa manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Bentuk kebaikan tersebut dapat diwujudkan dalam kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, maupun kemanusiaan, seperti membantu sesama yang membutuhkan, mendorong kesejahteraan bersama, serta menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

Sebaliknya, ayat ini juga dengan tegas melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Larangan tersebut menjadi peringatan agar umat Islam tidak terlibat dalam kerja sama yang merugikan orang lain, melanggar norma agama, maupun merusak tatanan sosial. Segala bentuk kolaborasi yang mengarah pada kezaliman, pelanggaran hukum, atau konflik sosial bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat mendatangkan dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat.

2.4 Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran dalam Pasolog, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagaimana masalah yang urgen. Pada dasarnya kerangka berpikir adalah penjelasan sementara mengenai objek penelitian yang menjadi permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 2.2 Kerangka Berpikir



Sumber : Edward III dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Konsep Operasional

Sebagai titik tolak atau landasan untuk memecahkan masalah dalam penelitian implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Maka penulis mengambil teori implementasi kebijakan dari George C. Edward dalam Subarsono (2005:90). Dalam teori ini Edward memandang suatu implementasi kebijakan sangat ditentukan atau di pengaruhi oleh, yakni faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi (Alhogbi 2017).

Konsep Operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Muhammad Idrus 2009:77), sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja yang diketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisis dari variabel tersebut. Dalam pengukuran ini terdapat satu variabel yang diukur yaitu program PKK. Adapun variabel program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan indikatornya sebagai berikut:

Tabel 2.3 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	1.Komunikasi	a. Kejelasan b. Transisi
	2.Sumber Daya	a. Sumber daya manusia b. Fasilitas c. Anggaran
	3.Disposisi	a. Sikap pelaksana kebijakan b. Komitmen pelaksana kebijakan
	4.Struktur Birokrasi	a. SOP dan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Kebijakan

Sumber: Edward III dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan berfokus kepada implementasi program Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga dan faktor penghambat dari program tersebut. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan data dengan triangulasi data (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil peneliti kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Nartin et al. 2024).

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini diteliti di Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir, karena implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga menarik untuk di teliti, Adanya fenomena masalah factor penghambat dan pendukung program pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini lokasi penelitian terletak di Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilaksanakan pada Juli 2024 hingga selesai.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai pihak yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang digunakan terdiri atas data primer

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan data sekunder yang dikumpulkan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan guna menjawab rumusan masalah penelitian.

1. Data Primer

Data yang diperoleh atau di kumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama. Teknik yang dapat digunakan oleh peneliti ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dan obsevarsi.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh yaitu dengan cara di kumpulkan oleh peneliti dari sumber sumber lain yang telah ada sebelum penelitian dilakukan. pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan pengambilan foto, video, dan lainnya.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang paling memahami informasi tentang penelitian sebagai pelaku atau orang lain yang memahami objek penelitian.

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua PKK Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Pemerintah dan para anggota PKK Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Informasi tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat interaksi sosial yang diteliti. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah Perangkat Kelurahan Balai Raja dan masyarakat.

Tabel 3.1 Data Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Lurah	1
2	Ketua LPM	1
3	Ketua PKK	1
4	Anggota PKK	3
5	Masyarakat	3
	Jumlah	9

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2025

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian, adapun metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi. Kegiatan wawancara sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung melalui (whatsapp).

2) Observasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Obsevasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, dilakukan secara langsung pada objek penelitian dengan cara non partisipatif artinya tidak ikut serta dalam proses kerja dan mencatat hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam observasi peneliti terlebih dahulu meninjau ke lokasi ataupun tempat yang ingin diteliti, yaitu Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

3.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang dapat digunakan untuk menelusuri data historis yang ada dalam bentuk tulisan yaitu surat, catatan harian, dan laporan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, seperti obsevasi, wawancara, dokumentasi dan lainnya. Setelah pengumpulan data dilakukan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk deskripsi. Kemudian data tersebut di Analisa tentang Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kondisi Geografis Kelurahan Balai Raja

1. Sejarah Singkat Kelurahan Balai Raja

Pada zaman dahulu Desa Balai Raja berupa hutan belantara dan sungai-sungai yang mengalir dari RW 1 Balai raja menuju sungai Manding dan berkuala di sungai Mandau kelurahan Bala Raja pada masa kejayaan sakai Balai Raja termasuk kelompok tanah adat manti ijou bedasarkan buku adat Melayu Riau nomor: 05/SK/MKA/LAMR/4/01 tanggal 28 april 2001. Di sebuah kisah di pinggiran sungai Balai Raja berhentilah seorang raja dari Kerajaan Siak Sri Indrapura duduk disebuah balai (tempat perhentian) sambil makan dengan berulamkan daun ajo.

Sampai saat ini tumbuhan tersebut dinamakan ulam ajo maka semenjak itu daerah ini dinamakan Balai Raja. Dahulunya Balai Raja adalah bagian dari kepenghuluan Air Jamban karena wilayah ini sangat luas maka dimekarkan sekitar tahun 1980 dengan sebutan Balai Raja dahulunya bernama desa muda Balai Raja sesudah desa ini berdiri selama dua tahun berdirilah kelurahan Balai Raja sampai sekarang. Pada tahun 2002 Kecamatan Mandau di bagi menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir, dan Balai Raja termasuk wilayah kawasan Pinggir. Di Balai Raja terdapat beberapa makam pahlawan yang tidak dikenal namanya dari peninggalan perang dunia ke dua yang sampai sekarang berada pada wilayah cevron.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kondisi Wilayah

Kelurahan Balai Raja mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum 30,50-33 C dan suhu udara minimum 11'5C-15,55 C. Sebagai daerah mana lainnya yang beriklim tropis di Kelurahan Balai Raja terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan sehingga berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Kelurahan Balai Raja karna sebagian besar masyarakat Balai Raja bekerja disektor pertanian dan perkebunan.

3. Luas Wilayah

Kelurahan Balai Raja merupakan salah satu dari 14 Kelurahan di wilayah Kecamatan Pinggir yang terletak 10 Km kearah selatan dari kota Kecamatan. Kelurahan Balai Raja mempunyai luas wilayah seluas 25501 hektar.

4. Batas batas Wilayah

Wilayah Kelurahan Balai Raja berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tanah Putih.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Titian Antui.
- c. Sebelah Selatan berbatasan Dengan Kelurahan Pinggir.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pematang Pudu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Kondisi Demografi Kelurahan Balai Raja

1. Kependudukan

Kelurahan Balai Raja mempunyai jumlah penduduk 4896 jiwa yang tersebar dalam 6 wilayah RW dan 25 RT perincian Laki-laki 2641 dan Perempuan 2255.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kelurahan Balai Raja Tahun 2024

RW	LK	PR	Jumlah
RW 1	457	313	770
RW 2	753	286	1039
RW 3	348	149	497
RW 4	580	363	943
RW 5	407	476	883
RW 6	348	416	764
Jumlah	2641	2255	4896
Persentase	53,94%	46,06%	100%

Sumber: Data Kelurahan Balai Raja 2024

Berdasarkan klasifikasi jenis kelamin penduduk Kelurahan Balai Raja diatas dapat diketahui bahwa laki-laki berjumlah 2641 atau sebesar 53,94% dan perempuan berjumlah 2255 atau sebesar 46,06%. Dimana jumlah penduduk tertinggi berada di RW 2 yang berjumlah 1039 orang dan jumlah penduduk terendah berada di RW 3 yang berjumlah 497 orang.

2. Agama

Kehidupan beragama di Kelurahan Balai Raja menjunjung tinggi rasa nasionalisme artinya saling menjaga antara agama yang satu dengan agama yang lain sesuai dengan bunyi pasal 29 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Kelurahan Balai Raja Tahun 2024

Agama	Jumlah	Persentase (%)
Islam	2045	41,77
Kristen Protestan	958	19,57
Kristen Katolik	929	18,98
Hindu	368	7,51
Budha	596	12,17
Jumlah	4896	100

Sumber: Data Kelurahan Balai Raja 2024

Dilihat dari tabel di atas, tercatat sebagian besar penduduk Kelurahan Balai Raja beragama Islam yaitu sebanyak 2045 atau sebesar 41,77%, dan penduduk yang beragama Hindu menempati jumlah paling rendah yaitu sebanyak 368 atau sebesar 7,51

3. Mata Pencaharian

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Balai Raja Tahun 2024

Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Bekerja	712	14,54
Petani	2881	58,84
Wiraswasta	231	4,71
Buruh	354	7,23
Pedagang	295	6,02
Tukang	136	2,78
Pegawai Negeri Sipil	287	5,87
Total	4896	100

Sumber: Data Kelurahan Balai Raja 2024

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa sebagian besar penduduk di Kelurahan Balai Raja ini bermata pencaharian sebagai petani yaitu sebesar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2881 orang atau sebesar 58,84 % dan yang paling sedikit bermata pencaharian sebagai tukang yaitu sebanyak 136 orang atau sebesar 2,78 %.

4. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Di Kelurahan Balai Raja Tahun 2024

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Sekolah	904	18,46
TK	437	8,92
SD	1663	33,97
SMP	682	13,92
SMA	742	15,16
Perguruan Tinggi	468	9,56
Total	4896	100

Sumber: Data Kelurahan Balai Raja 2024

Dilihat dari tabel diatas, tercatat bahwa penduduk Balai Raja sebagian besar tamatan sekolah dasar yaitu sebesar 1663 orang atau sebesar 33,97 % dan yang kecil tamatan Taman Kanak-kanak yaitu sebesar 437 orang atau sebesar 8,92 %.

4.3 Visi dan Misi

Visi dan misi Kelurahan Balai Raja, sebagaimana umumnya kelurahan lain, berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Visi umumnya mencakup tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi berisi langkah-langkah konkret untuk mencapai visi tersebut.

1. Visi

Visi Kelurahan Balai Raja kemungkinan besar akan berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, dengan tujuan akhir yang spesifik seperti:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Masyarakat yang sejahtera, beriman, dan berakhlak mulia: Ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik: Fokus pada efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam pelayanan pemerintahan.
- c. Masyarakat yang berdaya, mandiri, dan berdaya saing: Mencakup aspek pendidikan, keterampilan, dan ekonomi.
- d. Lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari: Fokus pada kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kelestarian alam.

2. Misi:

Misi Kelurahan Balai Raja akan berisi langkah-langkah konkrit untuk mencapai visi tersebut. Beberapa contoh misi yang mungkin diterapkan:

- a. Peningkatan layanan publik: Melalui optimalisasi administrasi, penyediaan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan.
- b. Pengembangan potensi ekonomi masyarakat: Melalui pelatihan, bantuan modal, dan dukungan pasar.
- c. Peningkatan kualitas pendidikan: Melalui dukungan terhadap sekolah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan kualitas guru.
- d. Peningkatan kualitas kesehatan: Melalui penyediaan layanan kesehatan, edukasi kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan.

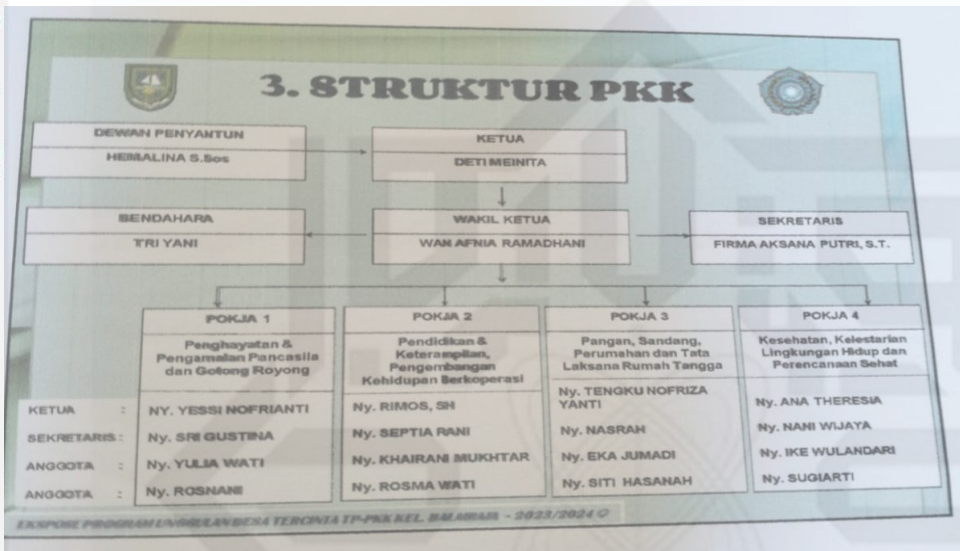
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peningkatan kualitas lingkungan: Melalui program kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pembinaan masyarakat: Melalui kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, dan kegiatan olahraga.

4.4 Struktur Organisasi PKK



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PKK

Sumber : Arsip Kelurahan Balai Raja

Berdasarkan struktur organisasi pkk di atas, berikut ini adalah uraian tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi pkk (Arsip Kelurahan Balai Raja).

1. Kepala Lurah

Tugas dan Fungsi Kepala Kelurahan (Lurah)

Kepala Kelurahan, yang biasa disebut Lurah, merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur pemerintahan di tingkat kelurahan yang berada langsung di bawah koordinasi Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahannya.

Secara umum, tugas pokok Lurah adalah:

“Melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota melalui Camat.”

Adapun rincian tugas dan fungsi Lurah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi pemerintahan, seperti pembuatan surat pengantar, identitas kependudukan, dan dokumen administrasi lainnya.
- b. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kerja sama dengan RT/RW dan lembaga kemasyarakatan.
- c. Melaksanakan pembangunan wilayah kelurahan, baik dalam bentuk pembangunan fisik seperti infrastruktur lingkungan, maupun nonfisik seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan cara menyelenggarakan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.
- e. Membina dan mengoordinasikan lembaga kemasyarakatan di kelurahan, seperti PKK, Karang Taruna, LPM, dan organisasi lainnya, agar dapat bersinergi dengan program kelurahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta mendorong terbentuknya kelompok usaha produktif dan kegiatan masyarakat lainnya.
- g. Mengelola keuangan dan aset kelurahan, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala untuk dilaporkan kepada Camat.
- h. Menjembatani aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dapat diterima, dipahami, dan diimplementasikan di tingkat kelurahan.

Tugas-tugas ini dilaksanakan oleh Lurah bersama dengan perangkat kelurahan dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan, dengan tujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan kelurahan yang partisipatif, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

2. Ketua PKK

Tugas Ketua Tim Penggerak PKK

Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) merupakan pemimpin organisasi PKK di setiap jenjang pemerintahan, termasuk di tingkat kelurahan. Ketua PKK memegang peran sentral dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Gerakan PKK sebagai mitra kerja pemerintah bertujuan mendorong kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat, khususnya perempuan dan keluarga, dalam pembangunan nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, tugas Ketua TP PKK adalah:

“Memimpin, menggerakkan, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi dalam rangka mewujudkan keluarga yang berdaya, mandiri, dan sejahtera melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.”

Adapun secara rinci, tugas dan tanggung jawab Ketua TP PKK meliputi:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh program kerja PKK, baik di tingkat internal organisasi maupun dalam kerja sama lintas sektor dengan pemerintah dan mitra pembangunan lainnya.
- b. Menyusun rencana kerja tahunan organisasi, berdasarkan hasil musyawarah rencana kerja dan kebutuhan masyarakat setempat.
- c. Membina dan mengarahkan kegiatan empat kelompok kerja (Pokja) PKK, yaitu:
 - 1) Pokja I: Bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta gotong royong.
 - 2) Pokja II: Pendidikan dan keterampilan keluarga, serta pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - 3) Pokja III: Pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga.
 - 4) Pokja IV: Kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mendorong partisipasi aktif masyarakat, terutama kaum ibu dan keluarga, dalam kegiatan pemberdayaan di bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan.
- e. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan para pengurus, kader, dan pihak terkait lainnya guna mengevaluasi program serta menyusun strategi pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
- f. Melakukan pembinaan terhadap kader PKK, baik dalam hal administrasi, pelaporan, maupun pelaksanaan kegiatan lapangan.
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program PKK di lingkungan masyarakat.
- h. Menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan pemerintah kelurahan, kecamatan, dan instansi terkait lainnya, guna memperoleh dukungan dalam pelaksanaan program kerja.

Dengan tugas-tugas tersebut, Ketua TP PKK menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan pembangunan berbasis keluarga yang partisipatif dan berkelanjutan, serta menjembatani program pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat akar rumput.

3. Wakil Ketua PK

Tugas Wakil Ketua Tim Penggerak PKK

Wakil Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) memiliki peran penting dalam mendukung dan membantu Ketua PKK dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. Dalam struktur kepengurusan, Wakil Ketua bertindak sebagai koordinator antara Ketua dengan kelompok kerja (Pokja), serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan tugas-tugas strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Secara umum, Wakil Ketua TP PKK bertugas:

“Membantu Ketua PKK dalam memimpin organisasi dan melaksanakan program kerja PKK, serta menggantikan Ketua apabila berhalangan.”

Secara rinci, tanggung jawab Wakil Ketua TP PKK meliputi:

- a. Mendampingi Ketua dalam menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja tahunan, serta memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada dua kelompok kerja (Pokja) PKK, yang umumnya meliputi:
 - 1) Pokja I: Bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong royong.
 - 2) Pokja II: Pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi.
- c. Menjadi penghubung antara Ketua dan anggota pengurus lainnya, termasuk membantu menyampaikan arahan dan kebijakan Ketua kepada para pengurus, kader, serta Pokja.
- d. Mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan PKK, termasuk melakukan supervisi terhadap kegiatan-kegiatan lapangan.
- e. Mengganti peran Ketua jika Ketua berhalangan hadir, baik dalam kegiatan resmi, rapat koordinasi, maupun dalam pengambilan keputusan organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Membina kader dan masyarakat bersama Ketua, serta ikut serta dalam kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan kampanye program PKK kepada masyarakat.
- g. Berperan aktif dalam menjalin kerja sama dengan lembaga mitra atau instansi pemerintah, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan keluarga.

Dengan tanggung jawab tersebut, Wakil Ketua TP PKK tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap struktural, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan, efektivitas, dan keberhasilan program PKK di tingkat kelurahan atau desa.

4. Sekretaris PKK

Tugas Sekretaris Tim Penggerak PKK

Sekretaris dalam organisasi Tim Penggerak PKK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran administrasi dan dokumentasi kegiatan. Sebagai bagian dari struktur kepengurusan, Sekretaris bertanggung jawab dalam hal pencatatan, penyusunan laporan, serta pengelolaan data kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Secara umum, tugas Sekretaris TP PKK adalah:

“Membantu Ketua dalam bidang administrasi organisasi, dokumentasi kegiatan, serta menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi program PKK.”

Secara rinci, tugas Sekretaris TP PKK meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengelola administrasi organisasi PKK, seperti menyusun dan mengarsipkan surat masuk dan keluar, membuat notulen rapat, serta menyusun dokumen kegiatan lainnya.
- b. Menyusun rencana kerja tahunan bersama Ketua, dan memastikan seluruh kegiatan didokumentasikan dengan baik sesuai dengan program yang telah direncanakan.
- c. Menyiapkan dan menyusun laporan kegiatan secara berkala, baik laporan triwulan, semester, maupun tahunan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada pemangku kepentingan di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
- d. Membantu pelaksanaan rapat-rapat organisasi, termasuk menyusun undangan, daftar hadir, dan mencatat hasil pembahasan rapat.
- e. Menjadi penghubung antara Ketua, Wakil Ketua, dan Pokja (Kelompok Kerja) dalam hal koordinasi administrasi, guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK.
- f. Mengarsipkan seluruh data dan dokumentasi kegiatan PKK, baik berupa laporan tertulis, foto kegiatan, maupun data pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program.
- g. Berkolaborasi dengan Bendahara PKK dalam menyusun laporan keuangan, terutama jika menyangkut dokumentasi penggunaan anggaran kegiatan.

Dengan tanggung jawab tersebut, Sekretaris PKK berperan sebagai pengelola informasi dan administrasi yang memastikan bahwa setiap kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PKK terdokumentasi secara sistematis, rapi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran ini mendukung keberhasilan program pemberdayaan yang dijalankan oleh TP PKK di tingkat kelurahan.

5. Bendahara PKK

Tugas Bendahara Tim Penggerak PKK

Bendahara Tim Penggerak PKK merupakan pengurus yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola seluruh aspek keuangan organisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan keluarga, pengelolaan keuangan yang transparan dan tertib sangatlah penting, sehingga peran bendahara menjadi salah satu kunci keberhasilan program-program PKK.

Secara umum, tugas Bendahara TP PKK adalah:

“Mengelola keuangan organisasi secara tertib, akuntabel, dan transparan sesuai dengan program kerja PKK yang telah direncanakan.”

Secara rinci, tugas Bendahara meliputi:

- a. Mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dana organisasi, baik yang bersumber dari pemerintah, swasta, maupun hasil kegiatan PKK itu sendiri.
- b. Membuat dan menyusun laporan keuangan secara berkala, meliputi laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan yang dilaporkan kepada Ketua TP PKK dan, bila diperlukan, kepada pemerintah kelurahan atau mitra program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengelola dan menyimpan dana organisasi dengan aman dan sesuai ketentuan, termasuk bertanggung jawab atas kas tunai, rekening bank, dan bukti-bukti transaksi.
- d. Mendampingi Ketua dan Sekretaris dalam perencanaan anggaran kegiatan, serta memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun.
- e. Menyiapkan bukti-bukti keuangan seperti kwitansi, nota, dan dokumen pendukung lainnya sebagai bagian dari pertanggungjawaban keuangan organisasi.
- f. Bertanggung jawab terhadap audit internal atau pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh pihak terkait, baik dari pemerintah maupun lembaga pengawasan lainnya.
- g. Bekerja sama dengan Sekretaris dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan, terutama dalam bagian laporan keuangan.

Peran Bendahara sangat penting untuk memastikan bahwa program-program PKK berjalan dengan dukungan anggaran yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pengelolaan keuangan yang profesional dan transparan, organisasi PKK akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maupun pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan keluarga.

6. Ketua Pokja 1

Tugas Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pokja I dalam Tim Penggerak PKK memiliki fokus pada bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta gotong royong. Ketua Pokja I memegang peranan penting dalam menggerakkan kader dan masyarakat agar nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta memupuk semangat kebersamaan dan kerja sama sosial.

Secara umum, tugas Ketua Pokja I TP PKK adalah:

“Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong royong sesuai dengan 10 Program Pokok PKK.”

Adapun tugas dan tanggung jawab Ketua Pokja I secara rinci meliputi:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- b. Menggerakkan masyarakat dan kader PKK untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, kebersihan lingkungan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
- c. Membina hubungan harmonis antar warga dan lembaga masyarakat untuk memperkuat semangat persatuan dan kesatuan di lingkungan kelurahan.
- d. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air melalui berbagai kegiatan, seperti pertemuan rutin, penyuluhan, dan peringatan hari-hari besar nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Pokja I dengan Pokja lain dan pihak terkait, sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan seluruh program PKK.
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pokja I dan menyampaikan hasilnya kepada Ketua TP PKK untuk evaluasi dan tindak lanjut.

Melalui peran aktif Ketua Pokja I, diharapkan nilai-nilai luhur Pancasila dapat melekat dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus memperkuat solidaritas dan kebersamaan yang menjadi modal penting dalam pembangunan keluarga dan masyarakat.

7. Ketua Pokja 2

Tugas Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK

Pokja II Tim Penggerak PKK fokus pada bidang pendidikan dan keterampilan keluarga, serta pengembangan kehidupan berkoperasi. Ketua Pokja II bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha koperasi keluarga sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Secara umum, tugas Ketua Pokja II adalah:

“Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang pendidikan, keterampilan keluarga, serta pengembangan kehidupan berkoperasi sesuai dengan 10 Program Pokok PKK.”

Tugas dan tanggung jawab Ketua Pokja II secara rinci meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan yang bertujuan meningkatkan pendidikan keluarga, baik formal maupun nonformal, seperti pelatihan keterampilan bagi anggota keluarga terutama ibu-ibu PKK.
- b. Menggerakkan kader dan masyarakat untuk aktif mengikuti pelatihan keterampilan dan kegiatan pendidikan lainnya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kelurahan.
- c. Mengembangkan dan memfasilitasi pembentukan serta pengelolaan usaha koperasi keluarga sebagai upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
- d. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan terkait pentingnya pendidikan, keterampilan, serta pengelolaan usaha koperasi dalam mendukung ekonomi keluarga.
- e. Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Koperasi, untuk mendapatkan dukungan teknis dan materi pelatihan bagi kader dan masyarakat.
- f. Menyusun laporan kegiatan Pokja II secara berkala dan menyampaikan hasilnya kepada Ketua TP PKK sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program.

Dengan tugas tersebut, Ketua Pokja II berperan penting dalam meningkatkan kapasitas dan keterampilan keluarga serta mendorong kemandirian ekonomi melalui pendidikan dan koperasi, yang merupakan bagian integral dari keberhasilan program pemberdayaan keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8 Ketua Pokja 3

Tugas Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK

Pokja III dalam Tim Penggerak PKK bertugas di bidang pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga. Ketua Pokja III memiliki tanggung jawab dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan kebutuhan dasar serta keterampilan rumah tangga.

Secara umum, tugas Ketua Pokja III adalah:

“Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga sesuai dengan 10 Program Pokok PKK.”

Rincian tugas Ketua Pokja III meliputi:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan pangan bergizi dan seimbang bagi keluarga, termasuk sosialisasi pola konsumsi yang sehat dan pengelolaan makanan keluarga.
- b. Menggerakkan kader dan masyarakat dalam kegiatan produksi, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya pangan lokal secara efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam pengelolaan sandang atau pakaian, termasuk keterampilan menjahit, merawat pakaian, serta pemanfaatan bahan sandang yang ekonomis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengupayakan perbaikan dan peningkatan kualitas perumahan keluarga, baik dari segi kenyamanan, kebersihan, keamanan, maupun aspek lingkungan hidup.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan program tata laksana rumah tangga, seperti pengelolaan keuangan keluarga, kebersihan rumah, dan pemanfaatan waktu yang produktif di lingkungan keluarga.
- f. Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan terkait pengelolaan kebutuhan dasar keluarga, baik pangan, sandang, maupun perumahan, untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga.
- g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pokja III dan menyampaikan hasilnya kepada Ketua TP PKK sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program.

Dengan menjalankan tugas-tugas tersebut, Ketua Pokja III berperan strategis dalam memastikan kebutuhan dasar keluarga terpenuhi secara optimal, yang merupakan faktor penting dalam mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan mandiri.

9. Ketua Pokja 4

Tugas Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK

Pokja IV dalam Tim Penggerak PKK fokus pada bidang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Ketua Pokja IV bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program-program yang bertujuan meningkatkan kesehatan keluarga dan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Secara umum, tugas Ketua Pokja IV adalah:

“Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat sesuai dengan 10 Program Pokok PKK.”

Adapun tugas dan tanggung jawab Ketua Pokja IV secara rinci meliputi:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat, seperti penyuluhan kesehatan, imunisasi, dan pengendalian penyakit menular.
- b. Menggerakkan kader PKK dan masyarakat dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk kegiatan kebersihan lingkungan, penghijauan, dan pengelolaan sampah.
- c. Melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya perencanaan sehat dalam keluarga, meliputi perencanaan kehamilan, pola hidup sehat, dan pencegahan penyakit.
- d. Berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan teknis dan sumber daya dalam pelaksanaan program kesehatan dan lingkungan.
- e. Mengorganisasi pelatihan kader kesehatan dan lingkungan, agar kader dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pokja IV dan melaporkan hasilnya kepada Ketua TP PKK untuk evaluasi dan pengembangan program ke depan.

Dengan peran tersebut, Ketua Pokja IV berkontribusi dalam mewujudkan keluarga yang sehat, lingkungan yang bersih dan lestari, serta perencanaan hidup yang berkualitas, sehingga mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program PKK di Kelurahan Balai Raja berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan tujuan pemberdayaan keluarga. Program-program yang dilaksanakan meliputi peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi keluarga, serta penguatan nilai-nilai sosial dan budaya melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara aktif.
2. Peran Tim Penggerak PKK, terutama Ketua, Wakil Ketua, dan Pokja-pokja, sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Kepemimpinan yang koordinatif dan partisipasi aktif kader PKK serta dukungan dari pemerintah kelurahan menjadi faktor pendukung utama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
3. Keterlibatan masyarakat dalam program PKK cukup tinggi, namun masih terdapat tantangan dalam hal partisipasi aktif beberapa kelompok masyarakat, terutama dalam kegiatan yang memerlukan waktu dan komitmen berkelanjutan.
4. Sarana dan prasarana serta sumber daya pendukung lainnya cukup memadai, tetapi perlu peningkatan dalam hal pelatihan kader serta pengembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kapasitas sumber daya manusia agar program PKK dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pelaksanaan program PKK di Kelurahan Balai Raja dapat dikatakan efektif dalam memberdayakan keluarga, meskipun masih perlu adanya peningkatan kualitas pelaksanaan dan partisipasi masyarakat agar tujuan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dapat tercapai secara optimal.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Balai Raja, antara lain:

1. Peningkatan Pelatihan dan Pengembangan Kader PKK

Disarankan agar Tim Penggerak PKK bersama pemerintah kelurahan lebih rutin dan intensif mengadakan pelatihan serta pembinaan bagi kader PKK, agar kemampuan teknis dan pengetahuan mereka dalam menjalankan program dapat meningkat sehingga pelaksanaan program lebih optimal.

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara Lebih Luas

Diperlukan strategi yang efektif untuk mengajak lebih banyak anggota masyarakat, khususnya kelompok yang kurang aktif, agar mau berpartisipasi dalam kegiatan PKK. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang lebih menarik dan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Program PKK

Peningkatan fasilitas dan sarana pendukung, seperti ruang pertemuan, alat bantu pendidikan dan kesehatan, serta media komunikasi, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program menjadi lebih lancar dan efektif.

4. Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Pemerintah kelurahan dan TP PKK sebaiknya memperkuat koordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial agar program-program yang dilaksanakan mendapatkan dukungan teknis dan sumber daya yang memadai.

5. Monitoring dan Evaluasi yang Berkelanjutan

Disarankan agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program PKK untuk mengetahui kendala dan pencapaian, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara tepat waktu.

Dengan dilaksanakannya saran-saran tersebut, diharapkan program pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Balai Raja dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al Qur'an dan Hadist

Khotimah, 2022. Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis.

Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Sumodiningrat, Gunawan. 2009. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Surabaya : Gramedia Pustaka Utama.

Tangkilisan, 2003. Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus. Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI

Tim Penggerak PKK, 2025. Buku Panduan Pokja III: Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Menunjang Usaha Agrobisnis. Jakarta : Tim Penggerak PKK Pusat.

Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijakan. Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Malang.

Winarno. 2007. Proses dan Teori Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pressindo.

Jurnal:

Ahrogbi, Basma G., 'BAB II Landasan Teori A. Kebijakan Publik', *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53.9 (2017), 21–25 <Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/2796/3/BAB II.Pdf>

Antika, Rindi, And Mohd Aji Isnaini, 'Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan', *Al-Basyar: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 1.1 (2022), 10–16

Apriyani, T., Siregar, A., & Nasution, M. (2020). Gotong Royong dalam Memperkuat Partisipasi Warga Negara. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 45–55.

Devfa, Sri, And Nellis Mardhiah, 'Implementasi Program PKK Bidang Pemberdayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Gampong Lancong', *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8.1 (2022), 77–87 <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.43533>

Gonta, R., Astuti, R., & Hardiana, A. (2020). Studi literatur masalah permukiman kumuh terhadap kesehatan dan lingkungan. *Saujana: Jurnal Ilmiah Universitas Palangka Raya*, 1(1), 1–10.

Hanifah, Hanifah, Ahmad Yamin, And Suparman Suparman, 'Implementasi Kebijakan Tuntas Baca Al Qur'an (TBA) Melalui Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kabupaten Sumbawa Barat', *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7.1 (2024), 709–14

Hanis, Nikma Wahyuni, And Atika Marzaman, 'Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kecamatan Telaga', *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8.2 (2020), 123–35

Karlina, D., Bahari, Y., & Asriati, N. (2013). *Pola Asuh Pembentukan Keterampilan Sosial Anak (Studi pada Petani Desa Sango)*. Jurnal Untan.

Mardiah, Risna, 'Efektivitas Pelaksanaan Program PKK (Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga) Di Nagari Salareh Aia Kabupaten Agam' (Universitas Negeri Padang, 2022)

Mulyati, Mulyati, And Yeye Suhaety, 'Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Di Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu', *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 2.3 (2021), 288–94

Martin, S E, S E Faturrahman, M Ak, H Asep Deni, C Q M MM, Yuniawan Heru Santoso, And Others, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024)

Nim, Abigail Rotua Meiroda Sibarani, 'Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Retok Kecamatan RETOK B', *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (E-Journal)*, 6.1 (2017)

Pathony, Tony, 'Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kabupaten Subang', *Ijd-Demos*, 1.2 (2020), 262–89 <<https://doi.org/10.31506/ijid.v1i2.23>>

Rahmawati, Destri, 'Implementasi Program Kerja PKK (Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah', *Mau'idhoh Hasanah: Penelitian Kolektif Dosen Dan Mahasiswa*, 1.1 (2019), 79–91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Riana, Novi, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kec. Tampan Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Pasar Simpang Baru Dan Pasar Senggol)', *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53.9 (2014), 1689–99
- Roring, Andreas Delpiero, Michael Mantiri, And Marlien T Lopian, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan', *GOVERNANCE*, 1.2 (2021)
- Rusdi, Nurazmi Izmi, 'Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun', 2018
- Salam, Abdus, Sri Kamariyah, And Ika Devy Pramudiana, 'Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PKK Kemajet Di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang', *Soetomo Administrasi Publik*, 2.1 (2024), 1–12
- Salu, M. (2022). Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Didesa Naitimu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu (Doctoral Dissertation, Univrsitas Timor).
- Sari, R. P., & Pratiwi, D. (2022). Peran PKK dalam Meningkatkan Kesadaran Keluarga tentang Kesehatan Reproduksi di Kecamatan Ciputat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(1), 34-41.
- SARI, T R I TIARA, 'Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sangkir Indah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)
- Shiyana, Syifa, Reina Apriliani, Meta Hendrayani, And Ahmad Hamdan, 'Implementasi Program Pemberdayaaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya', *Joce (Journal Of Community Education)*, 3.1 (2023), 66–74
- Siregar, E. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga di Kecamatan Medan Helvetia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 6(2), 20–28.
- Sukarman, And Sugiar, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Badan Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Karimun', *Jurnal Agribisnis*, 11.6 (2017), 183–201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susatin, Susatin, 'Strategi Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Meningkatkan Program Kerja Pkk Di Desa Gandoang Kecamatan Salem Kabupaten Brebes', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5.2 (2019), 139–52

Swardi, A. (2018). Pemberdayaan masyarakat melalui program UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga). *Jurnal Ilmiah Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 45-53.

Turhundayani, Turhundayani, 'Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah)', *ABIS: Accounting And Business Information Systems Journal*, 4.4 (2020) <<https://doi.org/10.22146/abis.v4i4.59322>>

UHN (Universitas HKBP Nommensen). (2021). Pelaksanaan Program Pokja I PKK dalam Penguatan Ketahanan Keluarga melalui Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 1(1), 15–24.

Wandira, S. A., & Ramadi, B. (2022). Upaya pemerintah dalam memberi perlindungan hukum untuk desain industri pada logo sebagai ciri khas suatu usaha di sosial media. *Jurnal Civilia*, 2(3), 90–97.

Widaningrum, Agustin, 'Implementasi Program Pemanfaatan Toga Pada Tim Penggerak Pkk Di Kelurahan Wijaya Kusuma' (Universitas Negeri Jakarta, 2023)

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga

Peraturan Daerah

Perda Kecamatan Pinggir Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis

LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Valen Bivo Edli lahir di Duri pada tanggal 10 Mei 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Yusmardi dan Ibu Yuliawati. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 04 Talang Mandi. Selanjutnya, pada tahun 2018 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 2 Pinggir. Kemudian pada tahun 2020 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Mandau. Pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara. Pada tahun 2024, penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Lurah Balai Raja. Pada tahun yang sama, penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bukit Timah, Kota Dumai. Penulis melakukan penelitian di Kantor Lurah Balai Raja dengan judul **“Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis”**, di bawah bimbingan Bapak Dr. Mashuri S.Ag, M.A. Penulis mengikuti ujian munaqasah pada hari Kamis, 8 Januari 2026 dan dinyatakan lulus dengan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).